

**MEMAKNAI DANA PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM
PENGANGGARAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR)**

BARBARA YESSI TARUK ALLO
FRANSISKUS RANDA¹
YAKOBUS K. BANGUN
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

ABSTRACT

This study aims to understand the face of poverty and the use of poverty alleviation funds in regional budgeting. The study was conducted in Makassar City, South Sulawesi by using case study approach. Data collection was done by interview and observation. In-depth interviews were conducted for poverty-stricken actors and budget managers of poverty funds. This research uses qualitative approach with case study analysis method which according to Creswel can be done through categorization stage, interpretation of pattern formation and naturalistic generaliation. The results show that there are three categories of poor people in the city of Maksassar namely vagrants and beggars, unemployed and poor fishermen. In the potency of policy and government budgeting behavior has been to eradicate the program of alleviation through increasing poverty alleviation budget allocation, but the fulfillment is not necessarily to alleviate poverty in Makassar City. This is because poverty is often used as a tool of exploitation by society and also as a political tool by the government.

Keywords: Poverty, Budgeting, Local Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami potret kemiskinan dan penggunaan dana pengentasan kemiskinan dalam penganggaran Daerah. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara yang mendalam dilakukan kepada aktor-aktor yang menjalani kemiskinan dan pengelola anggaran dana kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus yang menurut Creswel dapat dilakukan melalui tahapan kategorisasi, interpretasi pembentukan pola dan generaliasi naturalistik. Hasil pemaknaan menunjukkan adanya tiga kategori masyarakat miskin di Kota Maksassar yakni gelandangan dan pengemis, pengangguran dan nelayan miskin. Pada potret kebijakan dan perilaku penganggaran pemerintah telah melakukan program pengentasan melalui peningkatan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan, tetapi pemenuhan tersebut tidak serta-merta dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena kemiskinan seringkali dijadikan sebagai alat eksploitasi oleh masyarakat dan juga sebagai alat politik oleh pemerintah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Penganggaran, Pemerintah Daerah

¹e-mail : tatoranda@yahoo.com

1.PENDAHULUAN

Indikasi keberhasilan Otonomi Daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2004).

Salah satu instrumen dari kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan pengaturan distribusi dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi.Peran strategis pemerintah daerah melalui APBD sebagai implementasi dari kebijaksanaan keuangan daerah diharapkan berperan efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Kusreni dan Suhab, 2009). Dengan kata lain, peran pemerintah melalui anggaran daerah diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah belum menampakkan hasil yang optimal.Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral.Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Tabel 1.1
Anggaran dan Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar

Tahun	Anggaran Kemiskinan (miliar)	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
2011	105	71.700
2012	117	69.900
2013	156	66.400
2014	164	64.230
2015	379	71.429

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Pengeluaran atau belanja daerah yang sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pengentasan kemiskinan, pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa anggaran kemiskinan tiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tidak mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2012, jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan naik sebesar 12 miliar sedangkan jumlah penduduk miskin hanya berkurang sebanyak 1800 orang atau sebesar 2,5 persen dari tahun sebelumnya. Demikian juga pada tahun 2013 dan 2014, yakni jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan tahun 2013 naik sebesar 39 miliar dari tahun sebelumnya, sedangkan jumlah penduduk

miskin hanya berkurang sebanyak 2170 orang atau sebesar 3,26 persen. Bahkan pada tahun 2015, jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan naik sebesar 215 miliar sedangkan jumlah penduduk miskin malah naik sebesar 7019 orang atau sebesar 10,9 persen. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tujuan dari penyusunan anggaran pemerintah daerah tidak tercapai dengan baik.

Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji mengenai pengalokasian dana anggaran daerah terhadap penduduk miskin di Kota Makassar. Hal itu perlu dikaji mengingat alokasi anggaran yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah cukup tinggi, namun persentase penduduk miskin tetap tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul "Memaknai Dana Pengentasan Kemiskinan dalam Penganggaran Daerah".

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pemaknaan dana pengentasan kemiskinan dalam penganggaran daerah di Kota Makassar? Dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memaknai dana pengentasan kemiskinan dalam penganggaran daerah oleh pemerintah di Kota Makassar.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti tentang pemaknaan dana pengentasan kemiskinan dalam penganggaran daerah, dan juga bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.

2. LANDASAN TEORI

Konsep Anggaran

Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal penting bagi pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Adapun pengertian anggaran menurut Tanjung (2009:81) menyatakan bahwa : "Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode". Sedangkan Nordiawan dkk (2009:48) menyatakan bahwa: "Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya alam yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas "(*The process of allocating resources to unlimited demand*)".

Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:12), Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sedangkan menurut Freeman (2009) yang di kutip oleh Nordiawan (2010:9) yaitu sebagai berikut: "Anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)". Anggaran sektor publik harus bisa memenuhi kriteria yaitu merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, baik pemerintah provinsi atau daerah.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi : aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Mardiasmo (2010: 14) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik yaitu sebagai; alat Perencanaan (*planning tool*), alat Pengendalian (*control tool*), kebijakan Fiskal (*fiscal tool*), alat Politik (*political tool*), alat koordinasi dan komunikasi (*coordinating and communication tool*), alat Penilaian Kinerja (*performance measurement tool*), alat motivasi (*motivation tool*), serta alat menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Menurut Mardiasmo (2009: 71) jenis-jenis anggaran sektor publik meliputi Anggaran Operasional (*Operational Budget*), yaitu digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin; Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investment Budget*), yaitu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman.

Adapun tujuan penyusunan anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut: (a) membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah; (b) membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan; (c) memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja; dan (d) meningkatkan transparansi dan pertanggung-jawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.

Sedangkan manfaat anggaran sektor publik menurut Nafarin (2007:19) yaitu: (1) semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama; (2) dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan karyawan; (3) dapat memotivasi karyawan; (4) menimbulkan tanggung-jawab tertentu pada karyawan; (5) menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu; (6) sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin; dan (7) sebagai alat pendidikan bagi para manajer.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah (1) Fungsi Otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. (2) Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (3) Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (4) Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. (5) Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (6) Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Secara konseptual, kemiskinan sering kali dipandang dari berbagai sisi dan diklasifikasi berdasarkan beragam aspek. Secara umum, kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi. Pertama, kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks dan beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan, dan konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (*asset*) dan tingkat pengembalian (*return*) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, kualitas modal manusia, tanah dan teknologi). Kedua, kemiskinan juga merupakan akibat dan memberikan kontribusi terhadap keterselisihan atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar).

Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi. Adapun indikator-indikator kemiskinan menurut BPS yaitu: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar; tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya; tidak adanya jaminan masa depan; kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa; rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam; kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat; tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; ketidakmampuan untuk berusaha karena

cacat fisik maupun mental; dan ketidakmampuan sosial (anak-anak terlantar, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Penyebab Kemiskinan

Pada umumnya di Negara Indonesia, penyebab-penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia; tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia; tingkat pendidikan masyarakat yang rendah; merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global; menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat; biaya kehidupan yang tinggi; pembagian subsidi *in-come* pemerintah yang kurang merata; dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*), yakni menggunakan setting alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2005; 5) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi; 2003).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan tempat ini karena daerah tersebut termasuk salah satu kota yang memiliki presentase tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Dengan membawa surat izin penelitian, peneliti melakukan pengambilan data di kantor Bappeda Kota Makassar. Periode waktu dimulai dari bulan Juni sampai dengan tesis diseminarkan.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif, yakni lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam paradigma ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*, bukan *to explain* dan *to predict*) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma positivisme.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan adalah wawancara dan observasi. Wawancara mer yang dilakukan terhadap seseorang secara mendalam guna menemukan tema-tema inti. Sedang Pengamatan (observasi) dilakukan suatu aktivitas atau proses pada objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.

Metode Analisis Data

Menurut Creswell (1998) ada 4 bentuk analisis data dalam penelitian studi kasus yaitu: Pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Setelah pengumpulan kategori dilanjutkan dengan interpretasi langsung atas maknanya yang ditemukan dan dilanjutkan dengan pembentukan pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Langkah keempat adalah mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus.

4. PEMBAHASAN

Memahami Potret Masyarakat Miskin di Kota Makassar

Gelandangan dan Pengemis

Kota Makassar merupakan kota yang jumlah gelandangan dan pengemisnya masih tergolong banyak. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan banyak gelandangan dan pengemis di Kota Makassar, yakni di pinggir-pinggir jalan dan hampir di setiap perempatan lampu merah. Mereka meminta uang pada pengendara maupun pejalan kaki. Orang-orang yang menjadi gelandangan dan pengemis ini mulai dari anak kecil hingga yang lanjut usia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengemis, Pak Ridwan mengaku uang yang ia dapatkan dari meminta-minta hanyalah sedikit. Ia mengatakan bahwa;

“Saya jadi pengemis sudah lama. Sejak kecil saya sudah jadi pengemis yang minta-minta di pinggir jalan, mengharapkan ada orang-orang yang memberi uang kecil untuk saya beli makanan. Biasanya saya dapatnya dua puluh ribu, ya kadang kurang, kadang juga lebih tapi jarang sekali dapat lebih. Di rumah, saya tinggal bersama teman-teman yang lain, yakni teman-teman sesama pengemis. Di sana rumahnya saya kontrak bersama teman-teman, dimana kami patungan untuk membayarnya. Yang tinggal di rumah kontrakan saya banyak orang. Kami tinggal serumah dengan jumlah yang banyak karena kami tidak mampu jika membayarnya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu kami tinggal beramai-ramai dalam satu rumah”.

Berbagai variabel fundamental yang mempengaruhi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di perkotaan seperti kemiskinan, ledakan urbanisasi karena ketimpangan pembangunan kota dengan desa, kualitas sumber daya manusia yang rendah, angkatan kerja yang tidak terampil, keterbatasan daya serap angkatan kerja di sektor formal, tingginya angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan etos kerja yang rendah, belum berhasil diatasi. Oleh sebab itu, gelandangan dan pengemis terus meningkat dan merupakan fenomena kemiskinan kota.

Pengangguran di Kota Makassar

Pengangguran merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh kota-kota besar. Kota Makassar merupakan kota yang jumlah penganggurannya masih tergolong banyak. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar, Pak Irwan mengatakan bahwa: "Jumlah pengangguran di Makassar sebanyak 71.306 orang atau 6,64 persen dari jumlah penduduk Makassar". Angka pengangguran tersebut berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2016 dari jumlah penduduk Makassar sebanyak 1,8 juta jiwa.

Menurut hasil wawancara dengan saudara Wandy, yakni seorang lulusan SMA yang berusia 25 tahun, ia mengaku kesulitan dalam mencari pekerjaan karena hanya lulusan SMA. Ia mengatakan bahwa ;

"Saya sudah mencoba melamar beberapa pekerjaan di beberapa hotel dan di beberapa perusahaan, di beberapa bank bahkan di beberapa toko. Dulu saya pernah mendapat panggilan untuk kerja sebagai SPB atau penjaga toko, tetapi upah yang didapatkan tidak sebanding dengan keringat saya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan lagi. Kebanyakan perusahaan mencari karyawan dari kaum wanita , karena wanita dianggap lebih teliti dan ulet dalam melakukan tugasnya. Saya tidak mempunyai bakat atau ketrampilan yang menonjol, di sekolah saja saya tidak mendapat ranking.Saya hanya sekedar tamat dan saya tidak memiliki nilai yang bagus."

Terbukti untuk era modern tidak hanya cukup lulusan SMA/SMK sebagai bekal mencari pekerjaan, terlebih sekarang yang dibutuhkan tidak hanya ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi *skill* yang mampu untuk berkerja keras mencari pekerjaan dikota kota besar. Dan untuk instansi, mereka memasang syarat begitu tinggi untuk sebagian lulusan SMA/SMK.Tidak hanya lulusan SMA yang sulit mendapat pekerjaan, tetapi juga sarjana. Contohnya adalah saudara Hamry yang merupakan sarjana manajemen lulusan Universitas Indonesia Timur, ia mengatakan bahwa ;

"Mencari pekerjaan sangatlah sulit. Saya sudah mencoba melamar di berbagai bank, hotel maupun perusahaan industri, tapi hingga sekarang saya tidak juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Untuk mengisi kekosongan dan untuk mendapat penghasilan, saya mencoba menjadi juru parkir dan kadang ikut bersama teman menjadi buruh harian. Menjadi juru parkir juga dapat menghasilkan uang, sehari saya biasa memperoleh sekitar dua ratus ribuan setelah dibagi rata kepada teman-teman yang juga menjadi juru parkir di tempat yang sama. Kami biasa menjadi juru parkir di daerah sekitar pantai losari bila ada event, selebihnya saya biasa juga ikut bersama teman menjadi buruh harian bila ada rumah yang diborong oleh teman."

Kota Makassar merupakan kota yang padat penduduknya hampir di setiap wilayah. Namun, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2016, konsentrasi wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di lima kecamatan yaitu Tallo dengan jumlah penduduk 252.132 jiwa, Biringkanaya

dengan 241.385 jiwa, Tamalate dengan 227.949 jiwa, Rappocini dengan 183.965 jiwa, dan Panakukang dengan 181.684 jiwa. Menanggapi hal ini, Pak Hamri Haiya selaku Pak Camat dari Kecamatan Rappocini yang merupakan salah satu kecamatan yang terpadat penduduknya, mengatakan bahwa;

“Jumlah penduduk di Kota Makassar yang begitu banyak dengan tingkat lapangan kerja yang sedikit atau tidak sebanding membuat sejumlah orang menganggur. Tingkat pengangguran di Kota Makassar sejauh ini berada pada level 11% dari total penduduk berklasifikasi usia produktif dan tersebar pada beberapa wilayah kecamatan. Selain jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi di Kota Makassar juga dipicu oleh minimnya kemampuan tenaga kerja usia produktif terkhusus dari sisi ketrampilan kerja. Pendataan, identifikasi tenaga kerja di Kecamatan Rappocini Makassar sedang kami lakukan, di mana selanjutnya mereka yang terdata akan mengikuti pelatihan. Adapun pelatihan bagi penganggur tersebut merupakan bagian dari program Lorong Bebas pengangguran yang mana bakal diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di pemukiman padat serta memiliki kualifikasi pendidikan formal yang rendah maupun putus sekolah.”

Selain jumlah penduduk, inflasi menjadi salah satu penentu dari tingkat pengangguran. Inflasi suatu gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara.

Kemiskinan Nelayan di Kota Makassar

Nelayan merupakan salah satu dari sekian yang teridentifikasi di Kota Makassar sebagai golongan miskin. Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih banyak penduduk miskin yang tinggal di kawasan pesisir, dan penduduk miskin terbanyak yang tinggal di pesisir yaitu di kecamatan Ujung Tanah dan Mariso. Menurut salah seorang nelayan yang tinggal di pesisir pantai Ujung Tanah, yakni Bapak Haji Kasmuddin, beliau mengatakan;

“Saat ini, untuk mendapatkan ikan, kami harus melaut lebih jauh. Kami membutuhkan waktu sehari-hari dan modal lebih untuk bahan bakar serta bekal makanan selama melaut. Rata-rata pengeluaran saya adalah sekitar Rp 560.000 per bulan, sedangkan yang saya dapatkan hanya sekitar Rp 1,1 juta perbulan. Jadi dalam sebulan, keuntungan yang saya peroleh hanya kurang lebih Rp 540.000. Saya mempunyai seorang istri dan empat orang anak. Dengan penghasilan yang segitu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Saya pernah bersekolah sampai ke jenjang Sekolah Dasar tapi saya tidak tamat. Saya pikir lebih baik saya bekerja menghasilkan uang. Oleh sebab itu saya menjadi nelayan, karena untuk menjadi nelayan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.”

Ironisnya, walaupun seafood menjadi salah satu makanan favorit yang mahal, tingkat kesejahteraan nelayan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berprofesi bukan sebagai nelayan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Mujaidin, yang juga bekerja sebagai nelayan di pantai Ujung Tanah. Beliau mengatakan:

“Saya bekerja sebagai nelayan sudah sejak lama. Sebagai nelayan tentunya banyak kendala yang kami hadapi, misalnya cuaca yang kurang mendukung, seperti hujan, angin, dan gelombang besar. Bila cuaca baik, untuk mendapatkan ikan, kami melaut 3-4 hari, tetapi apabila cuaca buruk biasanya kami melaut malah sampai seminggu. Saya melaut sore, kalau tidak, pagi. Biasanya menginap di laut, tapi pernah kena badai juga, jadi harus menginap di pulau. Dari hasil menangkap ikan, yang saya dapatkan dalam sebulan sekitar Rp 1,2 juta. Tetapi pengeluaran saya dalam melaut juga banyak, sebulan kira-kira Rp 600ribuan, dan keuntungan yang saya terima hanyalah sekitar Rp 600ribuan.

Namun, ada sedikit kabar menggembirakan, seperti yang dikemukakan oleh Pak Haji Kasmuddin, ia mengaku bahwa “Rumah yang saya tinggali ini adalah rumah milik saya sendiri. Walaupun rumah kami jauh dari kata mewah, namun sebagian besar dari kami memiliki rumah sendiri”. Hal ini juga dibenarkan dengan data yang diperoleh dari BPS Sulawesi Selatan, yaitu lebih dari 84 persen rumah tangga nelayan memiliki rumah sendiri. Kenyataan lain, komunikasi bukan menjadi hambatan bagi para nelayan karena sekitar 83 persen nelayan memiliki telepon seluler. Para nelayan juga kurang beruntung ditinjau dari aspek pendidikan, dengan hampir 70 persen nelayan berpendidikan SD ke bawah dan hanya sekitar 1,3 persen yang berpendidikan tinggi.

Potret Program dan Penganggaran Kemiskinan oleh Masing-masing SKPD

Peran pemerintah Kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan menetapkan berbagai kebijakan yang terdiri dari beberapa program oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Makassar, Pak Amri mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar, yaitu dengan mendorong kebijakan kemiskinan dalam dokumen anggaran daerah yang merupakan hasil koordinasi dan kemudian dialokasikan kepada masing-masing SubBidang, dan juga membuat rencana aksi daerah yang berasal dari beberapa rencana SKPD yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah untuk mendapat perhatian dalam penanggulangan kemiskinan. Penyebab terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu oleh karena adanya urbanisasi yang dapat meningkatkan jumlah pengangguran serta kemiskinan di Kota Makassar.”

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala SubBidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kota Makassar, Pak Jamal mengatakan bahwa:

“Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dalam rapat koordinasi. Rencana Anggaran kemiskinan dibuat oleh masing-masing SubBidang yang kemudian dibahas dan ditetapkan dalam rapat koordinasi Bappeda Makassar. Selain urbanisasi, yang

menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah yaitu karena banyak penduduk miskin yang tidak terdaftar namanya, maka tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah. Selain itu, banyak penduduk yang sebenarnya sudah tidak tergolong miskin namun tetap ingin menjadi penduduk miskin karena ingin terus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini dapat membuat mereka menjadi tidak mandiri dan tidak berkembang sehingga terus bergantung kepada pemerintah.”

Tabel 4.1 Program dan Anggaran Kemiskinan Tahun 2016-2017

No.	SKPD	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Program	Anggaran (Rp)	Program	Anggaran (Rp)
1	Disnaker	3	3.532.027.700	2	3.446.492.200
2	DKP3	2	394.543.000	2	4.142.047.400
3	Dinsos	5	11.425.593.000	3	2.796.865.400
4	Dinas Koperasi dan UKM	3	7.805.186.000	2	750.000.000
5	Dinas PU	7	32.986.166.569	3	50.892.428.800
6	Dinas Pariwisata	2	875.234.800	2	450.000.000
7	Dinas Kesehatan	8	55.295.060.640	4	178.809.532.326
8	Dinas Pendidikan	5	96.457.864.000	2	829.817.000
9	DPPPA	3	5.348.891.200	4	9.733.278.268
10	Disperindag	4	7.254.707.136	2	1.727.324.800
11	Dinas PP dan KB	2	595.000.000	3	3.936.850.000
12	Dukcapil	3	2.435.723.000	3	1.181.211.090
13	Bappeda	4	4.094.438.600	2	2.362.787.200
14	Bagian Hukum	2	435.499.500	2	447.852.450

(RAD Kemiskinan, Bappeda Kota Makassar)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata anggaran oleh masing-masing SKPD untuk pengentasan kemiskinan cenderung meningkat dari tahun 2016-2017. Besarnya jumlah anggaran yang diprogramkan oleh pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar.

Alokasi Anggaran Kemiskinan di Kota Makassar

Apabila melihat dari tindakan Pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi masalah pengemis menurut peneliti sudah cukup efektif, tetapi hanya terkendala faktor-faktor kecil saja yang membuat penerapannya tertunda. Menurut hasil wawancara dengan penduduk miskin yang tinggal di Jl. Rappocini Lorong 5F, Ani mengatakan bahwa;

“Saya tidak mengetahui bantuan apa saja yang pemerintah berikan kepada penduduk miskin. Saya hanya pernah mendapatkan bantuan beras pada lima tahun yang lalu, serta bantuan kesehatan gratis. Anak saya berjumlah lima orang, dan semuanya tidak mendapatkan pendidikan gratis. Kiranya pemerintah dapat memberikan bantuan secara lancar kepada penduduk miskin di Kota Makassar.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Daeng Asri, yang juga bertempat tinggal di daerah tersebut. Ia mengatakan bahwa;

“Saya tidak tahu bantuan apa saja yang pemerintah berikan kepada penduduk miskin. Saya hanya pernah menerima bantuan beras dan kesehatan gratis. Anak saya berjumlah tiga orang, dan semuanya tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pendidikan gratis. Kiranya pemerintah dapat memberikan bantuan secara merata.”

Selain itu, hal yang serupa juga dikemukakan oleh saudari Ayu, yang bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Gang 1. Ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu bantuan apa saja yang pemerintah berikan kepada penduduk miskin. Saya hanya pernah mendapatkan bantuan beras dan kesehatan gratis. Anak saya berjumlah dua orang, dan semuanya tidak mendapatkan pendidikan gratis. Kiranya pemerintah memperhatikan penduduk miskin di sekitar kanal dan di dalam lorong-lorong terpencil.”

Menanggapi hal ini, Haji Saebani selaku Ketua RT 004 Kecamatan Rappocini Makassar, mengatakan bahwa:

“Warga RT.004 memang masih sangat banyak yang tergolong miskin. Di sini rata-rata warga berprofesi sebagai tukang becak, tukang bentor dan buruh harian. Bantuan pemerintah untuk warga miskin yang melalui saya adalah bantuan sembako atau beras. Yang lainnya saya tidak tahu, seperti jaminan kesehatan dan pendidikan gratis mungkin langsung diberikan kepada warga miskin yang memerlukan. Bagi warga miskin yang tidak terdaftar namanya tidak dapat menerima subsidi sembako atau beras tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah karena warga miskin tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai warga miskin, selain itu karena warga miskin tersebut telah terhapus namanya dikarenakan telah berpulang kampung dalam waktu yang lama dan belum terdata kembali.”

Bantuan dari pemerintah daerah Kota Makassar boleh dikatakan tidak merata. Masih banyak penduduk miskin di Kota Makassar yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari berbagai jenis bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah tiap tahunnya, masih banyak bantuan yang tidak diterima oleh sebagian besar penduduk miskin, bahkan tidak sedikit dari mereka yang bahkan tidak mengetahui berbagai jenis bantuan tersebut. Hal ini dapat

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah banyak penduduk miskin yang tidak terdaftar namanya, atau ada penduduk yang telah terhapus namanya karena bepergian ke kampung halaman dalam waktu yang cukup lama. Faktor lain ialah karena adanya urbanisasi, yaitu adanya pemindahan penduduk dari desa ke kota. Sebagian dari mereka adalah penduduk miskin yang bukan atau belum terdaftar sebagai penduduk miskin di Kota Makassar, oleh sebab itu mereka tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah, namun hanya akan menambah jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Makassar.

Makna Kemiskinan dalam Penganggaran Daerah *Kemiskinan Menjadi Alat Eksploitasi*

Pemerintah daerah Kota Makassar menduga banyak warga yang mengaku miskin. Hal ini terjadi karena mereka terlena dengan bantuan, baik dari Pemda Kota Makassar maupun bantuan dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan. Banyak warga yang mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.

Menurut Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Kota Makassar, Ibu Siti mengatakan bahwa:

“Banyak warga yang mengaku miskin, lantaran merasa cukup enak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk bantuan dari pemerintah yang terbungkus dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Saya melihat ada warga kita yang suka mengaku miskin, sehingga penurunan angka kemiskinan tidak bisa maksimal, meskipun program yang dilaksanakan sudah sangat luar biasa.”

Untuk memastikan bahwa warga yang akan diberikan bantuan benar-benar miskin dan memenuhi kriteria, termasuk dalam mengantisipasi adanya kebiasaan mengaku miskin, Ibu Siti menyarankan agar di depan rumah warga tersebut dipajang foto dan identitas sebagai tanda akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, lantaran masuk kategori miskin. Beliau menambahkan

“Kalau dia benar-benar miskin pasti tidak ada masalah dengan pemasangan alat peraga tersebut, namun yang mengaku miskin tetapi tidak miskin pasti akan merasa malu. Seharusnya tidak ada lagi orang miskin di Kota Makassar. Pasalnya, banyak hal yang mempengaruhi, mulai dari keamanan. Kedua, soal lapangan pekerjaan, banyak pekerjaan di Kota Makassar. Namun, mental malaslah yang membuat warga enggan bekerja. Ketiga, soal kesehatan, Pemda telah menanggung iuran BPJS bagi warga miskin bahkan yang mampu dan banyak aspek lainnya.”

Kemiskinan Sebagai Alat Politik oleh Pemerintah

Kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai kedok oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah. Anggaran untuk pengentasan kemiskinan hanyalah dijadikan sebagai kedok oleh pemerintah untuk keperluan pribadi atau politiknya. Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan

ditentukan kepentingan politik. Rubin dalam *The Politics of Public Budgeting* (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran seringkali mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

Fakta menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah dalam APBD ternyata lebih banyak untuk menggerakkan mesin birokrasi dari pada untuk kepentingan rakyat. Ini menunjukkan politik anggaran belum berada dalam arah yang benar. Sedangkan porsi belanja untuk kepentingan rakyat seringkali rawan dikorup, tidak efektif memecahkan masalah-masalah seperti kemiskinan, infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Kurang optimalnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi serta sektor anggaran publik yang menyangkut APBD dan APBN membuat para pelaku korupsi semakin merebak dimana-mana, bukan hanya di pusat melainkan juga di daerah sampai ke kepala RT sekalipun. Anggaran mempunyai peran yang cukup penting dalam melaksanakan tujuan negara yang berbentuk program-program kerja yang dipegang oleh wakil rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Memang benar jika dikatakan penyebab utama dari rendahnya kontribusi APBN dan APBD terhadap peningkatan kemakmuran rakyat adalah korupsi anggaran, karena tahukah anda bahwa penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai fasilitas negara juga sering disalahgunakan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa potret masyarakat miskin yang ada di Kota Makassar, meliputi gelandangan dan pengemis (Gepeng), pengangguran, serta kemiskinan nelayan di pesisir pantai. Kehadiran masyarakat miskin ini terus meningkat meskipun dana anggaran pengentasan kemiskinan terus meningkat. Pelaksanaan program pementasan kemiskinan belum merata, sehingga masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan karena data yang kurang akurat, banyak penduduk miskin yang tidak terdaftar namanya sehingga banyak dari mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Peningkatan jumlah masyarakat miskin juga disebabkan oleh adanya urbanisasi yang datang ke kota untuk mengadu nasib sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di kota. Faktor lain yaitu jumlah penduduk yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka mempunyai anak lebih dari dua dengan penghasilan orang tua yang tidak mencukupi. Realitas kemiskinan demikian juga tidak luput dari aspek sosial bahwa kemiskinan dalam penganggaran daerah menjadi alat eksploitasi bagi masyarakat, banyak warga yang mengaku miskin agar terus mendapatkan bantuan dari pemerintah; dan aspek politik bagi pemerintah yang menjadikan kemiskinan sebagai sarana penggaran yang besar demi kepentingan-

kepentingan pemerintah seperti belanja pegawai, perjalanan dinas dan biaya rapat. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Makassar tetap tinggi, walaupun anggarannya banyak.

Saran

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini yang adalah: (1) Pemerintah Kota Makassar perlu lebih akurat dalam pengambilan data penduduk miskin agar dana pengentasan kemiskinan dalam anggaran daerah dapat teralokasikan dengan tepat sasaran dan merata kepada seluruh penduduk miskin di Kota Makassar. (2) Dalam menyusun anggaran dalam program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan perlu meningkatkan keterbukaan atau mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan pemerintah. Pemerintah juga perlu bekerja maksimal dalam pelaksanaan program-program tersebut agar dapat terealisasi dengan cepat dan bertanggung-jawab. (3) perlu kajian aspek sosial dalam memahami realitas penduduk miskin dan menghindari kepentingan politik dalam praktek penganggaran bagi penduduk miskin

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (1984). *Advokasi Anak Jalanan*. Jakarta: Rajawali.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Kabupaten/Kota Makassar dalam angka 2011*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Kabupaten/Kota Makassar dalam angka 2012*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kabupaten/Kota Makassar dalam angka 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kabupaten/Kota Makassar dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kabupaten/Kota Makassar dalam angka 2015*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar tahun 2015-2016*. Makassar.
- Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, J. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- Crotty, M. (1998). *The Foundation of Social Research Meaning and Perspective in the Research Process*. London: Sage.
- Freeman. (2009). *Anggaran Sektor Publik Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat.

- Heredia, C. dan Pueblo, E. (1996). Bank Dunia dan Kemiskinan. Jakarta: INFID.
- Kartiwa. (2004). Birokrasi Pemerintah Daerah. Medan: Pustaka Bangsa.
- Kusreni, S. Suhab, S. (2009). Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal DIE Ekonomi dan Manajemen Vol.5 No.3 hal 1-8.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Jurnal Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di pulau jawa periode 2006-2010).
- Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Meleong. (2005). Metodologi Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munandar, H., Kurniawan, F. Dan Santoso, P. (2007). Mencari Hubungan antara Kebijakan Moneter dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan. Kajian Menggunakan Data Regional Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, H. (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.
- Nordiawan, D. Iswahyudi. dan Rahmawati, M. (2009). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Riskawati dan Abdul. (2013). Faktor Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung). <http://www.academia.edu/> diakses dan diunduh pada 15 September 2017.
- Suparlan, P. (1993). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: PT. Obor Indonesia.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. JMPK Vol. 08/No.03/September/2005.
- Tanjung, A. (2009). Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Alfabeta.
- Todaro, M. dan Smith, S. (2006). Pembangunan Ekonomi Edisi ke- 9. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 dan 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

World Bank. (2000). *The Quality of Growth.* Kualitas Pertumbuhan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

World Bank.(2006). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Laporan Bank Dunia : Jakarta.

Yin,.R. (2013).Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.